



PENGELOLAAN KEUANGAN SERTIFIKASI KESESUAIAN SNI

Sumber pembiayaan sertifikasi kesesuaian SNI berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diusulkan tiap tahun. Besarnya usulan dana APBN dan PNBP berdasarkan penghitungan kebutuhan biaya operasional LSPro pada tahun yang akan datang. Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan penghitungan kebutuhan biaya operasional LSPro pada tahun yang akan datang, sebesar 67% dari nilai capaian PNBP tahun berjalan. Biaya operasional sertifikasi LSPro diusulkan oleh Manajer Puncak berdasarkan mekanisme alokasi pemanfaatan PNBP.

Untuk pelaksanaan PNBP terkait dengan SPPT SNI, akan berlaku untuk klien yang melakukan pengajuan permohonan per tanggal 31 Juli 2023. Sedangkan bagi klien yang pengajuannya sebelum tanggal 30 Juli 2023 masih difasilitasi melalui dana APBN (dengan syarat dokumen sudah lengkap dan benar).

Biaya yang dibebankan kepada pemohon sertifikasi/resertifikasi per tipe skema yang masuk ke dalam ruang lingkup, yaitu: 1) Permohonan sertifikasi produk; 2) Jasa auditor dan komisi teknis; 3) Biaya perjalanan dinas auditor.

Untuk pemohon yang berasal dari usaha mikro dan kecil, biaya perjalanan dinas (tidak dibebankan). Penetapan usaha mikro dan kecil berdasarkan lampiran I Permentan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran dan Perijinan Usaha Peternakan.

Langkah pemberian layanan sertifikasi produk sebagai berikut:

1. LSPro menerima pengajuan sertifikasi produk benih dan bibit ternak dari pemohon.
2. Manajemen Administrasi memverifikasi dan mencatat identitas pelanggan, jenis layanan dan kemudian menyiapkan estimasi tagihan biaya layanan sertifikasi produk yang terdiri atas biaya permohonan, jasa auditor/jasa sidang komisi teknis, dan biaya perjalanan dinas.
3. Estimasi tagihan biaya layanan sertifikasi produk yang harus dibayar oleh pemohon disampaikan ke Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen PKH untuk mendapatkan kode billing pembayaran PNBP.
4. Manajemen Administrasi membuat konsep surat tagihan biaya layanan sertifikasi produk untuk dikirimkan ke pelanggan berdasarkan estimasi yang dibuat dan kode billing yang diperoleh.
5. Manajemen Administrasi memantau proses pembayaran biaya layanan sertifikasi produk dari pemohon.



Lampiran: Simulasi PNBP biaya Sertifikasi pe Pemohon

| SIMULASI BIAYA SERTIFIKASI (PNBP) per Pemohon | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------------|-----------|--------|------|-------------------|
| Point | No | Keterangan | Keterangan | Biaya | Volume | Hari | Total Biaya |
| A | 1 | Permohonan | per tipe | 500.000 | 1 | 1 | 500.000 |
| | Biaya Jasa Permohonan | | | | | | |
| B | 2 | Jasa auditor untuk audit kecukupan dokumen | per perusahaan | 1.000.000 | 1 | 1 | 1.000.000 |
| | 3 | Jasa auditor untuk audit kesesuaian di dalam negeri | | | | | |
| | | a. Auditor kepala | per orang per hari | 2.000.000 | 1 | 2 | 4.000.000 |
| | | b. Auditor | per orang per hari | 1.500.000 | 1 | 2 | 3.000.000 |
| | | d. Petugas pengambil contoh | per orang per hari | 1.000.000 | 1 | 2 | 2.000.000 |
| | | 4 | Jasa sidang komisi teknis | | | | |
| | | d. Paket 4 (satu klien) | per produsen | 7.000.000 | 1 | 1 | 7.000.000 |
| Biaya Jasa Sertifikasi | | | | | | | 17.000.000 |
| C | 5 | Biaya perjalanan petugas (sesuai SBM) | per orang/hari | 6.500.000 | 3 | | 19.500.000 |
| | Total Keseluruhan Biaya | | | | | | |

contoh simulasi diatas, jumlah petugas 3 orang dengan waktu kerja efektif 2 hari, perjalanan by pesawat
 *untuk perjalanan dinas disesuaikan dengan SBU (tiket, penginapan, lumpsom, transport lokal, dan jumlah tim)
 *jumlah tim dan hari disesuaikan dengan pengajuan jumlah SNI dan lokasi

